



**INDONESIA
DEVELOPMENT
FORUM 2018**
INSPIRE · IMAGINE · INNOVATE · INITIATE



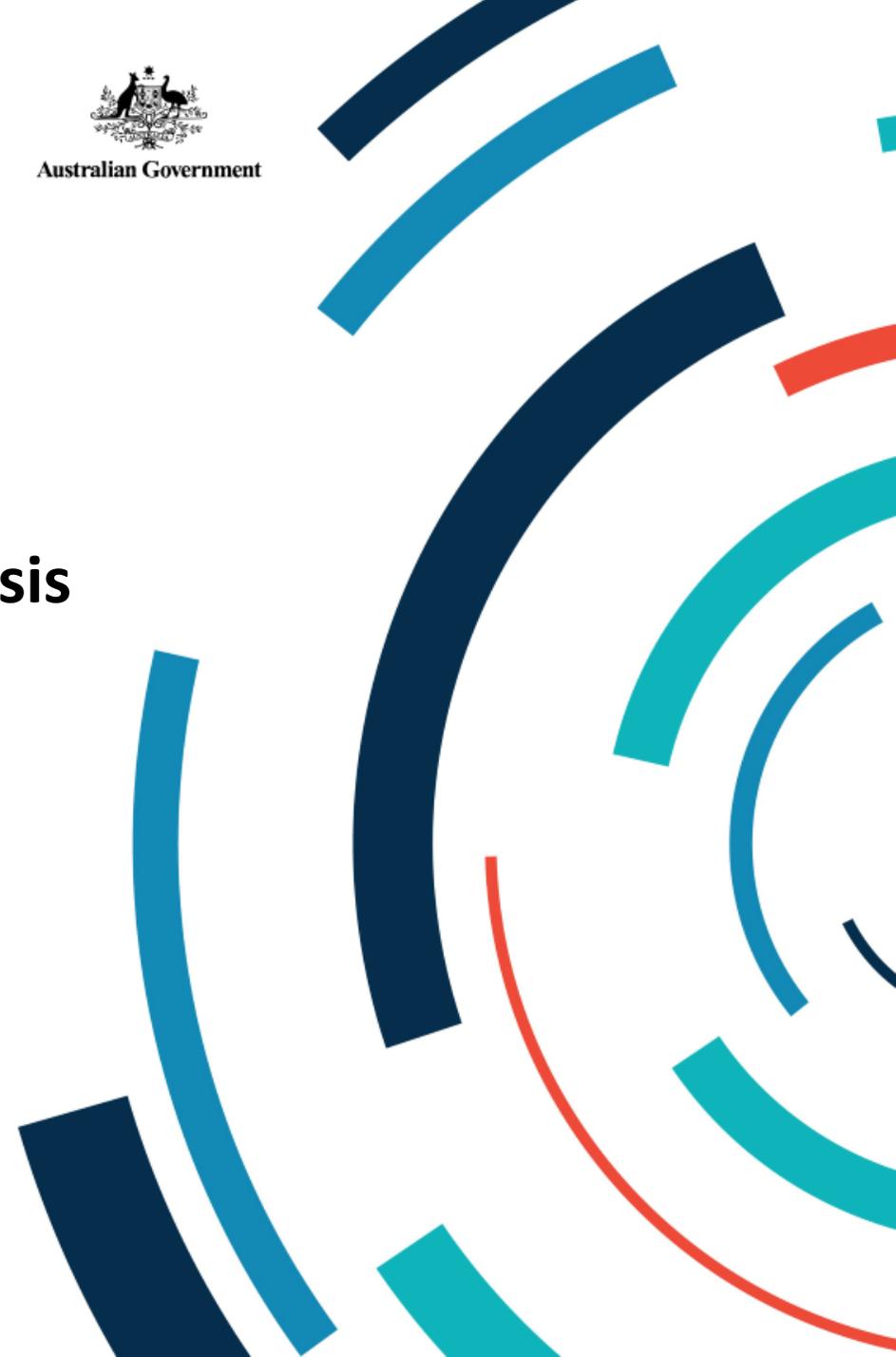
KNOWLEDGE
SECTOR INITIATIVE



Ketimpangan Pemenuhan Akses Air Bersih di Kabupaten Malang dan Pandeglang: Sebuah Analisis Diskursus

Husna Yuni Wulansari, Tadzki Nurshafira, Taradhinta Suryandari
Universitas Gadjah Mada

Riset ini disponsori oleh SHAPE-SEA





Pendahuluan

- Kebutuhan percepatan pemenuhan akses air minum nasional
 - Tingkat nasional
 - Target pemerintah Indonesia: 100% akses air minum 2019
 - Tingkat akses air minum nasional (2016): 71,14%
 - Kenaikan rata-rata (2014-2016): 1,5 poin/tahun
 - Level Kabupaten/kota
 - Terdapat ketimpangan antara wilayah dengan akses air bersih mudah (terdapat sumber air yang aksesibel, terdapat jaringan) dan wilayah dengan kondisi geografis yang tidak mendukung untuk adanya sumber air bersih (pesisir)
- Pertanyaan riset: Mengapa terjadi ketimpangan?
- Penelitian terdahulu: terlalu teknis, abai pada dimensi politis, meniadakan agensi pihak tertentu.



Aktor dan Persepsi terhadap Persoalan Akses

Pandeglang

a. Aktor

- i. Pemerintah → PDAM, Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), Dinas Kesehatan, Tim Fasilitator Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), dan pemerintah desa
- ii. Sektor privat → penyedia air di level dusun. pemilik tangki dan depot air minum
- iii. Masyarakat → warga-warga yang tinggal di daerah perkotaan dan pedesaan, yakni Desa Girijaya, Desa Cicadas, Desa Mogana, Desa Kadubungbang, Desa Cikupa, Desa Cigarunggung, dan Desa Karang Tanjung, serta Forum Pemberdayaan Masyarakat Pemanfaatan Mata Air Cilembur (FPM-PMAC).

- b. *Persepsi* → 'keterbatasan air baku' sebagai permasalahan utama



Aktor dan Persepsi terhadap Persoalan Akses

Malang

1. Aktor

- a. Pemerintah: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kesehatan (Dinkes), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Pemerintah Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).
- b. Swasta: Penyedia Air Tangki (Tirta Sumawe, AD, Padi Mas), Indosiar
- c. Masyarakat: Himpunan Penduduk Pengguna Air Minum (HIPAM)

2. Persepsi: 'kontur geografis' sebagai permasalahan utama



	Diskursus dominan	Diskursus terpinggirkan
Sumber permasalahan dari akses yang minim	Pandeglang Keterbatasan air baku (ketiadaan idle-capacity dan kontur geografis, ketiadaan fasilitas penunjang)	Pandeglang Keterbatasan air baku (kontur geografis)
	Malang Hambatan kontur geografis (jauh dari dan/atau tidak memiliki sumber air)	Malang Hambatan kontur geografis (jauh dari dan/atau tidak memiliki sumber air)
Respons yang diberikan	Pengelolaan top down, minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait pengelolaan air	Pengelolaan bottom up, inisiasi pengelolaan yang diatur secara mandiri oleh masyarakat



Dasar inisiasi proyek	Kerangka legal dan dokumen rencana pembangunan formal yang dikeluarkan oleh pemerintah	Kebutuhan untuk mendapatkan air bersih, inisiasi-inisiasi berlandaskan kesepakatan musyawarah
Pelaku utama pengelolaan	Pemerintah dan sektor privat	Masyarakat



Mekanisme yang digunakan

Pandeglang

Inventarisasi cakupan air dari atas, program 100-0-100 dan Kotaku, integrasi BUMDes, pengujian ilmiah kualitas air, penciptaan pasar depot air minum, penekanan bantuan dari pemerintah, penerimaan tarif air yang mahal

Malang

Program 100-0-100 dan hibah SR untuk MBR, menormalisasi standar kualitas air dan tarif air, penjualan tangki air, pemberian CSR

Pandeglang

Membuat air kemasan sendiri, musyawarah dan pengumpulan iuran, pengelolaan sumur bersama, penolakan terhadap pemerintah/pihak swasta

Malang

Pembuatan asosiasi HIPPAM, aspirasi untuk independen, pengembangan layanan ke wilayah cakupan PDAM, pemaknaan ulang standar kualitas air.



Kesimpulan

1. Ketimpangan akses air bersih di kedua kabupaten terjadi karena terdapat kontestasi antar berbagai macam diskursus terkait respons yang diambil untuk menyasiasi keterbatasan geografis dan keterbatasan air baku. Kontestasi ini menyebabkan diskursus yang dominan dianggap sebagai yang paling bisa diterima dan meminggirkan narasi lainnya.
2. Kesinergisan antara diskursus yang dominan dan yang terpinggirkan didorong sebagai bentuk pengelolaan kolektif yang diharapkan dapat memberi ruang bagi standar-standar khas dan pengetahuan yang dibawa oleh masing-masing pemangku kepentingan.
3. Diskursus tidak dapat secara eksklusif dilekatkan pada aktor tertentu



Bagaimana selanjutnya?

- a. Pemerintah perlu mengakui dan mengakomodasi diskursus dan inisiatif yang didorong oleh berbagai pihak: intervensi dapat dilakukan tanpa meniadakan diskursus dari masing-masing pemangku kepentingan
- b. Beberapa rekomendasi cara untuk mengakomodasi diskursus dari berbagai pemangku kepentingan:
 - i. Memperkuat upaya mandiri masyarakat dalam mengupayakan pemenuhan kebutuhan airnya
 1. Pokja AMPL perlu mengikutsertakan komponen masyarakat dari daerah yang krisis dan belum punya himpunan atau asosiasi pemenuhan air.
 2. Membantu pengadaan teknologi sederhana pengelolaan air (contoh: PLTMH (pembangkit listrik tenaga mikro hidro, elektrolisa air hujan).
 3. Memberikan dukungan pendampingan pengelolaan air secara mandiri.



Bagaimana selanjutnya? (2)

4. Mengatur dan membuat regulasi sektor privat penyedia air, misalnya memberikan regulasi terkait standar kesehatan, subsidi tangki air bersih, atau mengatur mekanisme harga).
 5. Melibatkan jejaring NGOs yang lebih luas, mengarusutamakan isu air dalam agenda NGOs:
 6. Melibatkan peran universitas, mengarusutamakan isu air di program-program KKN dan pengabdian universitas.
- ii. Mengalokasikan dana untuk menciptakan mekanisme atau program (melakukan institusionalisasi) di daerah krisis air yang tidak memiliki sumber air baku:
1. Program percepatan daerah yang akses airnya tertinggal
 2. Memayungi upaya transfer teknologi dan pengetahuan antara daerah-daerah yang pengelolaan akses airnya baik dan daerah-daerah krisis air
 3. Membangun pipanisasi untuk mengalirkan air di daerah yang terhambat kontur geografis



INDONESIA
DEVELOPMENT
FORUM 2018
INSPIRE • IMAGINE • INNOVATE • INITIATE



Terima Kasih

